



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Permohonan Izin Penilai Publik

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Penilai Publik bidang Penilaian Properti / Penilaian Bisnis *).

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) Coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 2 -

Formulir 2 : Permohonan Izin Penilai Publik

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENILAI PUBLIK	
Keterangan Pemohon	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir	: Tempat : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
3. Alamat tempat tinggal	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
4. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Nomor Kartu Tanda Penduduk	: <input type="text"/>
6. Nomor Pokok Wajib Pajak	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
Keterangan Pendidikan	
7. Lulusan Perguruan Tinggi	: <input type="text"/> Kota : <input type="text"/>
8. Fakultas	: <input type="text"/>
9. Jurusan	: <input type="text"/>
10. Tahun lulus	: <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
11. Tanda lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP *)	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Keterangan Pengalaman Penilaian	
12. Nama KJPP	: <input type="text"/>
13. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
14. Jabatan terakhir KJPP	: <input type="text"/>
15. Pengalaman Penilaian	: <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> Thn Thn
a. Sebagai Penilai	: <input type="text"/> jam <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> Thn Thn
b. Ketua Tim	: <input type="text"/> jam <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> Thn Thn
16. Pekerjaan/ jabatan lainnya selain di KJPP	: <input type="text"/>
17. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari KJPP	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
..... Pemohon	
(.....)	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi ijazah strata 1 atau strata 2 yang dilegalisir;
- c. Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi yang bersangkutan;
- d. Fotokopi tanda lulus Ujian Sertifikasi Penilai (USP) yang telah dilegalisir oleh Asosiasi Profesi;
- e. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani yang bersangkutan;
- f. Surat keterangan pengalaman kerja;
- g. Rekapitulasi pengalaman kerja di bidang Penilaian (Formulir 2 a);
- h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Penilai Publik 2 (dua) lembar.

***) Apabila tanggal kelulusan USP telah melewati masa 2 (dua) tahun, wajib melampirkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 50 (lima puluh) SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir (Formulir 2 b).**



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 - 5 -

Formulir 2 b : Daftar Kegiatan PPL

DAFTAR KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPL) PENILAI PUBLIK
 BAGI PENILAI PUBLIK YANG KELULUSAN USP-NYA TELAH MELEWATI MASA 2 (DUA) TAHUN

Nama Penilai Publik :

No.	TOPIK PPL	KEGIATAN PPL			JML SKP
		TANGGAL	TEMPAT	PENYELENGGARA	
JUMLAH					

Formulir dilengkapi dengan fotokopi sertifikat PPL



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal lahir :
Pekerjaan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin sebagai Penilai Publik, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin Penilai Publik adalah benar, dan saya tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

BIRO UMUM

Antoni Suharto

NIP. 060041107





LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125/PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

.....

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIPP



Formulir 2 : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik
Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU ATAS PERMINTAAN SENDIRI	
Keterangan Penilai Publik	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
3. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Nomor : KEP- <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
5. Nama KJPP	: <input type="text"/>
6. Alamat KJPP	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
7. Nomor telepon / fax	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
8. Izin KJPP	: Nomor : KEP- <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
9. Kedudukan pada KJPP sebagai	: <input type="checkbox"/> Pemimpin KJPP <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan KJPP <input type="checkbox"/> Rekan KJPP
10. Alasan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri	: <input type="text"/>
11. Jangka Waktu Yang Dimohonkan	: <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
Surat Pernyataan	
12. Surat Rekomendasi dari KJPP bagi Penilai Publik yang menjadi Rekan pada KJPP	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
13. Surat pernyataan dari Asosiasi Profesi	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Pemohon,	
(.....)	
NIPP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Surat rekomendasi dari KJPP bagi Penilai Publik yang menjadi Rekan pada KJPP;
- b. Bukti pendukung alasan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu; dan
- c. Surat pernyataan dari Asosiasi Profesi.

Diisi oleh petugas Departemen Keuangan:

- | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 14 Sedang diperiksa oleh PPAJP | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 15 Sedang diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 16 Sanksi Peringatan dalam 48 bulan terakhir | : | <input type="checkbox"/> Tidak pernah | <input type="checkbox"/> 1 kali | <input type="checkbox"/> 2 kali | <input type="checkbox"/> 3 kali |
| 17 Sedang dikenai sanksi pembekuan izin | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 18 Sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.L. Departemen
Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian Jasa
Penilai Publik Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

.....

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian
Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu
Atas Permintaan Sendiri

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 : Permohonan Mengakhiri Masa Penghentian Pemberian Jasa
Penilai Publik Untuk Sementara Waktu Atas Permintaan Sendiri

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PERMOHONAN MENGAKHIRI MASA PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU ATAS PERMINTAAN SENDIRI	
Keterangan Penilai Publik	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
3. Nomor telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Nomor : KEP- <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
5. Nama KJPP :	<input type="text"/>
6. Alamat KJPP :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
7. Nomor telepon/ fax :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
8. Izin KJPP :	Nomor : KEP- <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
9. Kedudukan pada KJPP sebagai :	<input type="checkbox"/> Pemimpin KJPP <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan KJPP <input type="checkbox"/> Rekan KJPP
Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu	
10. Jangka Waktu Yang Dimohonkan :	<input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
11. Surat Persetujuan :	Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Jangka Waktu :	<input type="text"/> Tahun <input type="text"/> Bulan
Tanggal Berakhir :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Pemohon,
	(.....)
	NIPP
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :	
a. Fotokopi tanda bukti mengikuti PPL selama 1 (satu) tahun terakhir;	
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
c. Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Profesi; dan	
d. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3).	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal lahir :
Pekerjaan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan persetujuan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 4 -

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan mengakhiri masa penghentian pemberian jasa penilai publik untuk sementara waktu atas permintaan sendiri adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

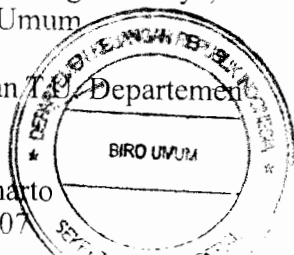
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T. & Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Izin Penilai Publik
yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

.....

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Izin Penilai Publik
yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan izin Penilai Publik yang dikenakan sanksi pembekuan untuk memberikan jasa kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Izin Penilai Publik
yang Dikenakan Sanksi Pembekuan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN IZIN PENILAI PUBLIK YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN	
Informasi Penilai Publik	
1. Nama	: <input style="width: 90%;" type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal	: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 15%;" type="text"/>
3. Nomor telepon	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
4. Izin Penilai Publik	: Nomor : <input style="width: 5%;" type="text"/> . <input style="width: 5%;" type="text"/> . <input style="width: 10%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
5. Nama KJPP	: <input style="width: 90%;" type="text"/>
6. Alamat KJPP	: <input style="width: 90%;" type="text"/> <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 15%;" type="text"/>
7. Nomor telepon/ fax	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
8. Izin KJPP	: Nomor : KEP - <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/>
	tgl bln thn
Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik	
9. Jangka Waktu	: <input style="width: 5%;" type="text"/> <input style="width: 5%;" type="text"/> Bulan
10. Sanksi Pembekuan Izin	: Nomor : <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/>
	Tanggal berakhir : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/>
	tgl bln thn
Pemohon,	
(.....)	
NIPP	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :	
a. Daftar realisasi pelaksanaan PPL Penilai dan dokumen pendukungnya (Formulir 2 a);	
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	
c. Fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Profesi.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 a : Daftar Kegiatan PPL bagi Penilai Publik
Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik

DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN (PPP) PENILAI

Nama Penilai Publik :

No.	TOPIK PPL	KEGIATAN PPL			JUMLAH SKP
		TANGGAL	TEMPAT	PENYELENGGARA	
J U M L A H					

Formulir dilengkapi dengan fotokopi sertifikat PPL.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal lahir :
Pekerjaan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan persetujuan pengaktifan izin Penilai Publik yang dikenakan sanksi pembekuan untuk memberikan jasa kembali, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 5 -

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan persetujuan pengaktifan izin Penilai Publik yang dikenakan sanksi pembekuan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

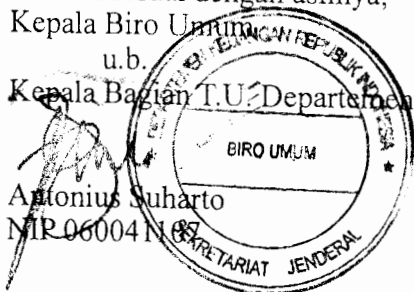
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP.060041168





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri Penilai Publik.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

Formulir 2 : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI PENILAI PUBLIK	
Keterangan Penilai Publik	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
3. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Nomor : KEP - <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Keterangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
5. Nama KJPP	: <input type="text"/>
6. Alamat KJPP	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
7. Nomor telepon / fax	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
8. Izin KJPP	: Nomor : KEP - <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
9. Kedudukan pada KJPP sebagai	: <input type="checkbox"/> Pemimpin KJPP <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan KJPP <input type="checkbox"/> Rekan KJPP
Surat Pernyataan	
10. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Penilai Publik	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
11. Surat pernyataan mengenai penyelesaian perikatan profesional	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Pemohon,	
(.....) NIPP	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :	
a. Surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Penilai Publik yang bersangkutan;	
b. Surat persetujuan pengunduran diri Penilai Publik yang ditandatangani oleh seluruh Rekan bagi KJPP berbentuk badan usaha persekutuan;	
c. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penilai Publik yang bersangkutan mengenai penyelesaian perikatan profesional antara Penilai Publik dengan kliennya; dan	
d. Asli surat izin Penilai Publik.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 3 -

Diisi oleh petugas Departemen Keuangan:

- | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 12. Sedang diperiksa oleh PPAJP | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 13. Sedang diadukan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 14. Sanksi Peringatan dalam 48 bulan terakhir | : | <input type="checkbox"/> Tidak pernah | <input type="checkbox"/> 1 kali | <input type="checkbox"/> 2 kali | <input type="checkbox"/> 3 kali |
| 15. Sedang dikenai sanksi pembekuan izin | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| 16. Sedang menjalani kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal | : | <input type="checkbox"/> Ya | <input type="checkbox"/> Tidak | | |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan pengunduran diri Penilai Publik adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T. U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk badan usaha Perseorangan

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin,
KJPP

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 2 -

Formulir 2 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Perseorangan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BERBENTUK BADAN USAHA PERSEORANGAN	
Informasi Pemimpin KJPP	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir	: <input type="text"/> , <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
3. Alamat tempat tinggal	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
4. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Nomor : KEP- <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
6. Anggota Asosiasi Profesi	: Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Informasi KJPP	
7. Nama KJPP	: <input type="text"/>
8. Alamat KJPP	: <input type="text"/> <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
9. Nomor telepon / fax	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
10. Nomor Pokok Wajib Pajak	: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/>
11. Status gedung kantor	: <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Sewa Luas <input type="text"/> m ²
Informasi Tenaga Penilai	
12. Tenaga Penilai	: <input type="text"/> orang
13. Pendidikan	: <input type="text"/> orang S-3 <input type="text"/> orang S-2 <input type="text"/> orang S-1 <input type="text"/> orang D-III
Pemimpin, KJPP.....	
(.....) NIPP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Fotokopi surat izin Penilai Publik dari Pemimpin KJPP;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin KJPP dan tenaga Penilai;
- c. Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma III, disertai fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;
- d. Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJPP;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi untuk Pemimpin KJPP;
- g. Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
- h. Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
- i. Foto tampak depan dan ruangan kantor KJPP;
- j. Sistem pangkalan data Penilaian;
- k. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3);
- l. Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpin Rekan atau Rekan KJPP *); dan
- m. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin KJPP, 1 (satu) lembar.

***) untuk Penilai Publik yang sebelumnya telah memiliki KJPP.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal lahir :

Pekerjaan Terakhir :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berbentuk badan usaha Perseorangan, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,

meterai secukupnya

(.....)

NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk badan usaha Perseorangan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

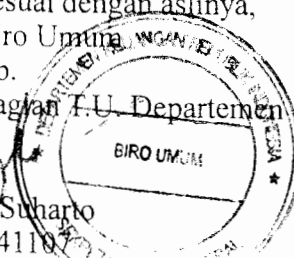
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Yang Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
yang Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk badan usaha Persekutuan

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2, Formulir 3, dan Formulir 4 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 : Permohonan Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Berbentuk Badan Usaha Persekutuan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BERBENTUK BADAN USAHA PERSEKUTUAN	
Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir :	<input type="text"/> , <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
3. Alamat tempat tinggal :	<input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
4. Nomor telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Nomor : KEP - <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
6. Anggota Asosiasi Profesi :	Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
Informasi Rekan KJPP	
7. Nama :	<input type="text"/>
8. Tempat dan tanggal lahir :	<input type="text"/> , <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
9. Alamat tempat tinggal :	<input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
10. Nomor telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
11. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Nomor : KEP - <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
12. Anggota Asosiasi Profesi :	Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> tgl bln thn
(apabila Rekan KJPP lebih dari seorang agar ditambahkan)	
Informasi KJPP	
13. Nama KJPP :	<input type="text"/>
14. Alamat KJPP :	<input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
15. Nomor telepon/ fax :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
16. Nomor Pokok Wajib Pajak :	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
17. Status gedung kantor :	<input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Sewa Luas <input type="text"/> m ²
18. Jumlah Rekan KJPP	<input type="text"/> Penilai Publik <input type="text"/> Non Penilai Publik



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Informasi Tenaga Penilai

19. Tenaga Penilai : orang
20. Pendidikan : orang S-3 orang S-2
 orang S-1 orang D-III

Pemimpin Rekan,
KJPP.....

(.....)
NIPP

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Fotokopi surat izin Penilai Publik untuk Pemimpin Rekan dan Rekan yang Penilai Publik;
- b. Fotokopi akta perjanjian kerjasama KJPP yang disahkan oleh notaris;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Rekan, Rekan dan tenaga Penilai;
- d. Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma III, disertai fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;
- e. Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJPP;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KJPP;
- g. Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi untuk Pemimpin Rekan dan Rekan yang Penilai Publik;
- h. Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
- i. Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
- j. Foto tampak depan dan ruangan kantor KJPP;
- k. Sistem pangkalan data Penilaian;
- l. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan (Formulir 3);
- m. Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpin Rekan atau Rekan KJPP *); dan
- n. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin Rekan dan Rekan KJPP, 1 (satu) lembar.

***) untuk Penilai Publik yang sebelumnya telah memiliki KJPP.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal lahir :
Pekerjaan Terakhir :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya mendapatkan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berbentuk badan usaha Persekutuan, saya tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan profesi saya sebagai Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan
Pemimpin Rekan / Rekan KJPP *),

meterai secukupnya

(.....)
NIPP

*) Coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 4 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang berbentuk badan usaha Persekutuan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

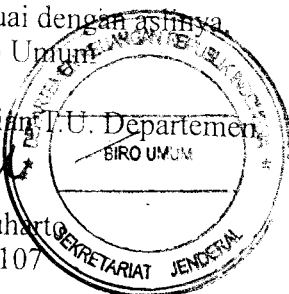
NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian I.U. Departemen
Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Permohonan Izin Pembukaan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Pembukaan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2 : Permohonan Izin Pembukaan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)	
Informasi Pemimpin Cabang KJPP	
1. Nama	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir	: <input style="width: 60%;" type="text"/> , <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> tgl bln thn
3. Alamat tempat tinggal	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
4. Nomor telepon	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
5. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Nomor : KEP - <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/> tgl bln thn
6. Surat Penunjukan Menjadi Pemimpin Cabang KJPP	: Nomor : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/> tgl bln thn
Informasi KJPP	
7. Nama KJPP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
8. Alamat KJPP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
9. Nomor telepon / fax	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
10. Izin Usaha KJPP	: Nomor : KEP - <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 5%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/> tgl bln thn
Informasi Kantor Cabang KJPP	
11. Alamat Cabang KJPP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
12. Telepon / Fax	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
13. NPWP Cabang KJPP	: <input style="width: 15%;" type="text"/> - <input style="width: 85%;" type="text"/>
14. Status gedung kantor	: <input type="checkbox"/> Milik sendiri <input type="checkbox"/> Sewa Luas <input style="width: 10%;" type="text"/> m ²
Informasi Tenaga Penilai	
15. Tenaga Penilai	: <input style="width: 5%;" type="text"/> orang
16. Pendidikan	: <input style="width: 5%;" type="text"/> orang S-3 <input style="width: 5%;" type="text"/> orang S-2 <input style="width: 5%;" type="text"/> orang S-1 <input style="width: 5%;" type="text"/> orang D-III
Pemimpin Rekan, KJPP..... (.....) NIPP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Surat persetujuan dari seluruh Rekan KJPP mengenai penunjukan salah satu Rekan yang Penilai Publik menjadi Pemimpin Cabang KJPP;
- b. Fotokopi surat izin usaha KJPP;
- c. Fotokopi izin Penilai Publik untuk Pemimpin Cabang KJPP;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Cabang KJPP dan tenaga Penilai;
- e. Daftar tenaga Penilai tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang serendah-rendahnya berijazah setara Diploma III, disertai fotokopi ijazah tenaga Penilai yang dilegalisir;
- f. Surat pengangkatan Penilai sebagai pegawai tetap KJPP;
- g. Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;
- h. Foto tampak depan dan ruangan kantor Cabang KJPP;
- i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang KJPP;
- j. Sistem pangkalan data Penilaian;
- k. Fotokopi Tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran; dan
- l. Foto berwarna berlatar belakang merah 4x6 terbaru dari Pemimpin Cabang KJPP, 1 (satu) lembar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin pembukaan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan
KJPP.....

meterai secukupnya

(.....)

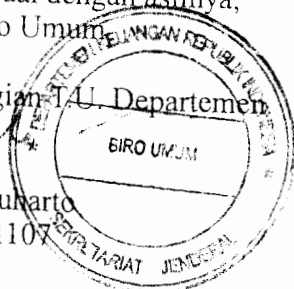
NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Departemen
Antonius Suharto
MIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan laporan pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 - 2 -

Formulir 2 : Laporan Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)	
Informasi Penanggung jawab Kantor Perwakilan KJPP	
1. Nama	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir	: <input style="width: 60%;" type="text"/> , <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> <small style="margin-left: 150px;">tgl bln thn</small>
3. Alamat tempat tinggal	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
4. Nomor telepon	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 80%;" type="text"/>
Informasi KJPP	
5. Nama KJPP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
6. Alamat KJPP	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
7. Nomor telepon / fax	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 80%;" type="text"/>
8. Izin Usaha KJPP	: Nomor : KEP- <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> <small style="margin-left: 150px;">tgl bln thn</small>
Informasi Kantor Perwakilan KJPP	
9. Alamat	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
10. Nomor Telepon / Fax	: <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 80%;" type="text"/>
11. Surat Keputusan Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP *)	: Nomor : <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> - <input style="width: 10%;" type="text"/> <small style="margin-left: 150px;">tgl bln thn</small>
Pemimpin / Pemimpin Rekan *), KJPP..... (.....) NIPP	
*) coret yang tidak sesuai.	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :	
a. fotokopi surat izin usaha KJPP; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab Kantor Perwakilan KJPP; c. surat keputusan Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP tentang pembukaan Kantor Perwakilan KJPP; dan d. surat keterangan domisili Kantor Perwakilan KJPP.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 3 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan : Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP *).....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang kami lampirkan pada formulir Pembukaan Kantor Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan benar, ditandatangani pada tanggal tertera pada akhir keterangan ini dengan meterai cukup untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini diketahui tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

meterai

(.....)

NIPP

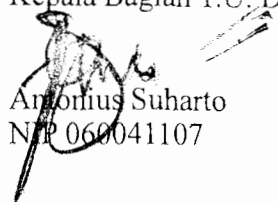
*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Suharto
NIP 060041107

28



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Permohonan Penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penutupan
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



Formulir 2 : Permohonan Penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)	
Informasi Pemimpin/ Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Tempat dan tanggal lahir	: <input style="width: 80%;" type="text"/> , <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> tgl - <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> bln - <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> thn
3. Alamat tempat tinggal	: <input style="width: 100%;" type="text"/> Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/> Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
4. Nomor telepon	: <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
5. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> . <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> . <input style="width: 80%;" type="text"/> Nomor : KEP - <input style="width: 90%;" type="text"/> Tanggal : <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> tgl - <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> bln - <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> thn
Informasi KJPP	
6. Nama	: <input style="width: 100%;" type="text"/>
7. Alamat	: <input style="width: 100%;" type="text"/> Kota : <input style="width: 100%;" type="text"/> Kode Pos : <input style="width: 20%;" type="text"/>
8. Nomor telepon / fax	: <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> - <input style="width: 90%;" type="text"/>
9. Izin usaha KJPP	: Nomor : KEP - <input style="width: 90%;" type="text"/> Tanggal : <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> tgl - <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> bln - <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> thn
10. Bentuk Badan Usaha KJPP	: <input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Persekutuan
11. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP	: Nomor : <input style="width: 90%;" type="text"/> Tanggal : <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> tgl - <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> bln - <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> thn
12. Surat penyelesaian perikatan profesional antara KJPP dengan kliennya	: Nomor : <input style="width: 90%;" type="text"/> Tanggal : <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> tgl - <input style="width: 5%; text-align: center;" type="text"/> bln - <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> thn
Pemimpin / Pemimpin Rekan *) KJPP..... (.....) NIPP	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini : a. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP yang ditandatangani oleh Pemimpin KJPP bagi KJPP berbentuk badan usaha Perseorangan; b. Surat pernyataan tentang penutupan KJPP yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP bagi KJPP berbentuk badan usaha Persekutuan; c. Surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan antara KJPP dengan kliennya yang ditandatangani oleh Pemimpin KJPP untuk KJPP yang berbentuk badan usaha Perseorangan; d. Surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan antara KJPP dengan kliennya yang ditandatangani oleh seluruh Rekan KJPP untuk KJPP yang berbentuk badan usaha Persekutuan; dan e. Asli surat izin usaha KJPP. *) coret yang tidak sesuai.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 3 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan penutupan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

.....,.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penutupan Cabang
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)di
.....

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan penutupan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan,
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

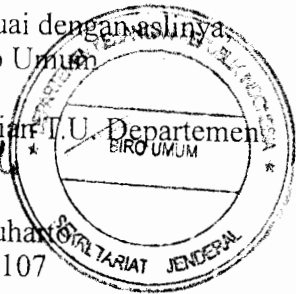
NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian I.U. Departemen
Antoniussuharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin
Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang
Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin
Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang
Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dikenakan sanksi pembekuan izin usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) Yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Usaha

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN USAHA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN IZIN USAHA	
Informasi Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP *)	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal :	<input type="text"/> <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
3. Nomor telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi KJPP	
5. Nama KJPP :	<input type="text"/>
6. Alamat Kantor :	<input type="text"/> <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
7. Nomor telepon/ fax :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
8. Izin Usaha KJPP :	Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Sanksi Pembekuan Izin Usaha KJPP	
9. Jangka Waktu :	<input type="text"/> Bulan
10. Sanksi Pembekuan Izin :	Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Tanggal berakhir : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Pemimpin / Pemimpin Rekan *) KJPP.....
	(.....) NIPP
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :	
a. Fotokopi akta perjanjian kerjasama KJPP yang disahkan oleh notaris bagi KJPP berbentuk usaha Persekutuan;	
b. Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi dari Pemimpin KJPP bagi KJPP berbentuk usaha Perseorangan;	
c. Fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi dari Pemimpin Rekan KJPP dan Rekan KJPP yang Penilai Publik bagi KJPP berbentuk usaha Persekutuan;	
d. Fotokopi tanda bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran; dan	
e. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain.	
*) coret yang tidak sesuai.	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dikenakan sanksi pembekuan izin usaha KJPP adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

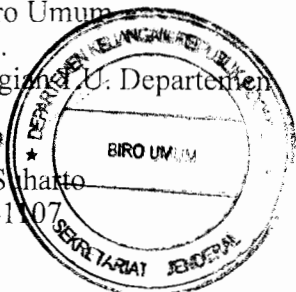
ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian U. Departemen

Antonijs Suharto
NIP.060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Pembukaan Cabang KJPP
yang dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin
Pembukaan Cabang KJPP yang Dikenakan Sanksi
Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin pembukaan Cabang KJPP..... di..... yang dikenakan sanksi pembekuan izin pembukaan Cabang KJPP.

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Izin Pembukaan Cabang
 KJPP yang Dikenakan Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP YANG DIKENAKAN SANKSI PEMBEKUAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP	
Informasi Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal	: <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
3. Nomor telepon	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi KJPP	
5. Nama KJPP	: <input type="text"/>
6. Alamat	: <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
7. Nomor telepon / fax	: <input type="text"/> / <input type="text"/>
8. Izin Usaha KJPP	: Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi Cabang KJPP	
9. Nama Pemimpin Cabang KJPP	: <input type="text"/>
10. Alamat Kantor	: <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
11. Nomor telepon / fax	: <input type="text"/> - <input type="text"/>
12. Izin Pembukaan Cabang KJPP	: Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Sanksi Pembekuan Izin Pembukaan Cabang KJPP	
13. Jangka Waktu	: <input type="text"/> Bulan
14. Sanksi Pembekuan Izin	: Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Tanggal berakhir : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Pemimpin Rekan, KJPP.....
	(.....) NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan salah satu Rekan yang Penilai Publik menjadi Pemimpin Cabang KJPP;
- b. Fotokopi izin Penilai Publik dari Pemimpin Cabang KJPP;
- c. Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain; dan
- d. fotokopi domisili usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan persetujuan pengaktifan kembali izin pembukaan Cabang KJPP di yang dikenakan sanksi pembekuan izin pembukaan Cabang KJPP adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan,
KJPP

meterai secukupnya

(.....)

NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian F.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama Teknis di Bidang Jasa Penilaian
Dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama
Teknis di Bidang Jasa Penilaian dengan Kantor
Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan melakukan kerjasama teknis di bidang jasa Penilaian dengan KJPPA.....

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan Formulir 2 dan Formulir 3 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



Formulir 2 : Permohonan Persetujuan Melakukan Kerjasama Teknis di Bidang Penilaian
dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN MELAKUKAN KERJASAMA TEKNIS DI BIDANG PENILAIAN DENGAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASING (KJPPA)	
Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Alamat tempat tinggal :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
3. Nomor telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
4. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Nomor :	KEP - <input type="text"/>
Tanggal :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi KJPP	
5. Nama KJPP :	<input type="text"/>
6. Alamat KJPP :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
7. Nomor telepon / fax :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
8. Izin Usaha KJPP :	Nomor : KEP - <input type="text"/>
Tanggal :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi KJPPA	
9. Nama KJPPA :	<input type="text"/>
10. Alamat KJPPA :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Negara :	<input type="text"/>
11. Nomor telepon / fax :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama	
12. KJPP :	Nama : <input type="text"/>
	Jabatan : <input type="text"/>
13. KJPPA :	Nama : <input type="text"/>
	Jabatan : <input type="text"/>
	Pemimpin / Pemimpin Rekan *) KJPP
	(.....) NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Profil KJPPA; dan
- b. Fotokopi perjanjian kerja sama KJPP dengan KJPPA yang disahkan Notaris.

***) coret yang tidak sesuai.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat tempat tinggal :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan persetujuan melakukan kerjasama teknis di bidang jasa Penilaian dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

meterai secukupnya

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Tahunan

.....

Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Realisasi Pendidikan Profesional
Lanjutan (PPL) Tahun Takwim.....

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan laporan realisasi Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Tahun Takwim.....

Berkenaan dengan hal tersebut terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Laporan Pindah Domisili, Pengunduran Diri dari KJPP, atau Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP

.....
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pindah Domisili / Pengunduran Diri dari KJPP
/ Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP *)

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan pindah domisili / pengunduran diri dari KJPP / status pemimpin rekan dan/atau rekan KJPP *).

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

- 2 -

Formulir 2 : Laporan Pindah Domisili, Pengunduran Diri dari KJPP, atau Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
LAPORAN PERUBAHAN *) :	
I. Domisili Penilai Publik;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
II. Pengunduran Diri dari KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
III. Status Pemimpin Rekan dan/atau Rekan KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Informasi Penilai Publik	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Alamat rumah :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Faksimili : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Email : <input type="text"/>
3. Izin Penilai Publik :	NIPP : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Nomor : KEP- <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Lama	
4. Nama KJPP :	<input type="text"/>
5. Alamat KJPP :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Faksimili : <input type="text"/> - <input type="text"/>
6. Izin Usaha KJPP :	Nomor : KEP- <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
7. Kedudukan pada KJPP sebagai :	<input type="checkbox"/> Pemimpin KJPP <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan KJPP <input type="checkbox"/> Rekan KJPP
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Baru	
8. Nama KJPP :	<input type="text"/>
9. Alamat KJPP :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Faksimili : <input type="text"/> - <input type="text"/>
10. Izin Usaha KJPP :	Nomor : KEP- <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
11. Kedudukan pada KJPP sebagai :	<input type="checkbox"/> Pemimpin KJPP <input type="checkbox"/> Pemimpin Rekan KJPP <input type="checkbox"/> Rekan KJPP
12. Surat Pernyataan Mengenai Penyelesaian Perikatan Profesional :	Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	tgl bln thn
	Pemohon,

	NIPP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Diisi oleh petugas Departemen Keuangan:					
13. Sedang diperiksa oleh Kepala Pusat	:	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak		
14. Sedang diadakan oleh pihak lain yang layak ditindaklanjuti	:	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak		
15. Sanksi Peringatan dalam 48 bulan terakhir	:	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> 1 kali	<input type="checkbox"/> 2 kali	<input type="checkbox"/> 3 kali
16. Sedang dikenai sanksi pembekuan izin	:	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak		
Dokumen yang Dilampirkan:					
a. Surat Keterangan Domisili yang baru;					
b. Surat Pernyataan Mengenai Penyelesaian Perikatan Profesional;					
c. Fotokopi Izin Penilai Publik;					
d. Surat persetujuan pengunduran diri dari seluruh Rekan KJPP bagi Penilai Publik yang telah menjadi Pemimpin Rekan atau Rekan KJPP;					
e. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penilai Publik yang bersangkutan menjadi pemimpin KJPP; dan					
f. Fotokopi Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama.					
*) pilih sesuai dengan perubahan yang terjadi.					

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

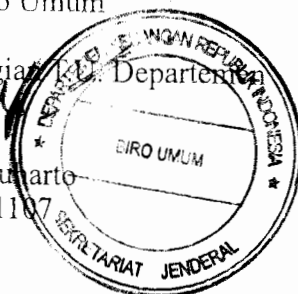
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian/KU. Departemen

Antonius Sumarto

NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan
Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

...../.....
Nomor :
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan
Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710

Menunjuk pada ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
..../PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, dengan ini kami sampaikan laporan
kegiatan usaha, laporan keuangan, laporan realisasi program kerjasama dengan KJPPA
dan laporan realisasi penggunaan tenaga kerja asing dari Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) untuk tahun takwim

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



Formulir 2 : Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan,
Laporan Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA dan
Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI PROGRAM KERJASAMA DENGAN KJPPA DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TAHUN TAKWIM	
I. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Bentuk Usaha :	<input type="text"/>
3. Alamat KJPP :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Domisili (Kota) :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
Telepon :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Faksimile :	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Email :	<input type="text"/>
Website :	<input type="text"/>
4. Izin Usaha KJPP :	Nomor : KEP- <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
5. NPWP KJPP :	<input type="text"/>
6. Status Kantor :	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa Luas <input type="text"/> m ²
II. Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP	
7. Nama :	<input type="text"/>
8. Alamat Rumah :	<input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/>
9. Izin Penilai Publik :	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/> Nomor : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
10. Terhitung Sejak :	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
III. Daftar Rekan KJPP *)	
11. Akta Perjanjian kerjasama :	Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
12. Jumlah Rekan :	<input type="text"/> Penilai Publik <input type="text"/> Non Penilai Publik <input type="text"/> laki-laki <input type="text"/> perempuan
13. Rekan ^{2.01)} :	Nama : <input type="text"/> Alamat Rumah : <input type="text"/> Kota : <input type="text"/> Kode Pos : <input type="text"/> Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Izin Penilai Publik : Nomor : . .
Tanggal : - -
Tgl Bln Thn
Terhitung Sejak : Tanggal : - -
Tgl Bln Thn

*) Diisi oleh KJPP berbentuk usaha Persekutuan sesuai dengan Formulir 2. 01, apabila jumlah rekan lebih dari satu.

IV. Cabang KJPP **)

14. Jumlah Cabang KJPP ^{2.02)} : kantor
Alamat Cabang KJPP :

Domisili (Kota) :
Kode Pos :
Telepon : -
Faksimile : -
Izin Pembukaan Cabang KJPP : Nomor : KEP-
Tanggal : - -
Tgl Bln Thn
NPWP Cabang KJPP : . . . - .
Status Kantor : Milik Sendiri Sewa Luas m²

15. Pemimpin Cabang KJPP **)

N a m a :
Alamat Rumah :
Kota :
Kode Pos :
Telepon : -
Izin Penilai Publik : Nomor : . .
Tanggal : - -
Tgl Bln Thn
Terhitung Sejak : Tanggal : - -
Tgl Bln Thn

**) Diisi oleh KJPP yang mempunyai Cabang KJPP sesuai dengan Formulir 2.02 apabila jumlah Cabang KJPP lebih dari satu.

V. Perwakilan KJPP ***)

16. Jumlah Perwakilan KJPP ^{2.03)} : kantor
Alamat Perwakilan KJPP :

Domisili (Kota) :
Kode Pos :
Telepon : -
Faksimile : -
Status Kantor : Milik Sendiri Sewa Luas m²
17. Pemimpin Perwakilan KJPP ***)
N a m a :
Alamat Rumah :
Kota :
Kode Pos :
Telepon : -

***) Diisi oleh KJPP yang mempunyai Perwakilan KJPP sesuai dengan Formulir 2.03 apabila jumlah Perwakilan KJPP lebih dari satu.



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

	- Desain Sistem Informasi Aset	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Pengelolaan Properti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Studi Kelayakan Usaha	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Jasa Agen Properti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Pengawasan Pembiayaan				
	Proyek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28. Jumlah Klien Menurut Bidang Usaha	: Manufaktur	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Konstruksi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Lembaga Keuangan :				
	- Perbankan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Asuransi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Dana Pensiun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	- Jasa Pembiayaan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Hotel & Pariwisata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Perdagangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pertanian, perkebunan, Kehutanan & Peternakan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pertambangan & Energi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Transportasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Pos & Telekomunikasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Bidang Usaha lainnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	IX. Laporan Keuangan ^{2.07-2.09)}				
X. Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA ^{2.10)}					
XI. Laporan Tenaga Asing pada KJPP yang bekerjasama dengan KJPPA ^{2.11)}					
					Pemimpin / Pemimpin Rekan KJPP.....
				 NIPP
Keterangan :					
a) Rincian jumlah rekan diisi dalam daftar rekan KJPP sesuai Formulir 2.01					
b) Daftar Cabang KJPP diisi sesuai Formulir 2.02					
c) Daftar Perwakilan KJPP diisi sesuai Formulir 2.03					
d) Rincian jumlah Tenaga Kerja Asing diisi sesuai Formulir 2.04					
e) Rincian jumlah Penilai Publik, Penilai, Tenaga Ahli lainnya dan Tenaga Administrasi diisi sesuai Formulir 2.05					
f) Daftar Rincian Kegiatan Usaha diisi sesuai Formulir 2.06					
g) Laporan Keuangan disampaikan secara komparatif tahun berjalan dan sebelumnya yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi beserta catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan Formulir 2.07 - 2.09					
h) Realisasi program kerjasama dengan KJPPA disusun sesuai dengan Formulir 2.10					
i) Laporan Tenaga Asing pada KJPP yang bekerjasama dengan KJPPA disusun sesuai dengan Formulir 2.11					

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 25 / PMK.01 / 2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Formulir 2.06

DAFTAR KLIEN KJPP
TAHUN TAKWIM

No.	Pemberi Tugas / Pengguna Jasa ¹⁾			Kepemilikan ²⁾	Jenis jasa yang diberikan ³⁾	Bidang Usaha ⁴⁾	Nama obyek / perusahaan yang dinilai	Metode Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan		Hasil Penilaian Obyek yang dinilai (dalam jutaan rupiah)	Penilai yang Menandatangani LHP ⁵⁾	Kantor Pelaksana Pusat / Cabang ⁶⁾	
	Nama	GP	NGP						Alamat dan No. Telepon	Nomor				Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan :

- 1) Lihat Formulir 2 Butir VIII.26.
GP = Go Publik, NGP = Non Go Publik.
Beri tanda ✓ yang sesuai pada kolom GP atau NGP yang tersedia
- 2) Misalnya : Swasta, BUMN, BUMD, dll (Lihat Butir VIII.25).
- 3) Misalnya : Penilaian Bisnis, Penilaian Properti, Monitoring Project, dll (Lihat Butir VIII.27).
- 4) Misalnya : Bidang Manufaktur, Komunikasi, Lembaga Keuangan, dll (Lihat Butir VIII.28).
- 5) Jika pekerjaan selain bidang penilaian, cantumkan pihak yang bertanggung jawab
- 6) Jika cabang, sebutkan cabang mana yang melaksanakan tugas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
- 12 -

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2.07 : Neraca Komparatif

KJPP
NERACA KOMPARATIF
Per Tanggal

ASSET	Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan	
Asset Lancar :				
Kas	XXXXX		XXXXX	
..... dst	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX		XXXXX	
Total Asset Lancar		XXXXX		XXXXXX
Asset Tetap				
Peralatan Kantor	XXXXX		XXXXX	
..... dst	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX		XXXXX	
Total Asset Tetap		XXXXX		XXXXX
Asset Lain-Lain				
..... dst	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX		XXXXX	
Total Asset Lain-Lain		XXXXX		XXXXX
Total Asset		XXXXXX		XXXXXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kewajiban :				
Jangka Pendek				
..... dst	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX		XXXXX	
Total Hutang Jangka Pendek		XXXXX		XXXXX
Hutang Jangka Panjang				
..... dst	XXXXX		XXXXX	
	XXXXX		XXXXX	
Total Hutang Jangka Panjang				XXXXX
Total Kewajiban		XXXXX		XXXXX
Ekuitas :				
Setoran Modal dari Sekutu	XXXXX		XXXXX	
Saldo Laba (Rugi)	XXXXX		XXXXX	
Labanya Tahun Berjalan	XXXXX		XXXXX	
Total Ekuitas		XXXXX		XXXXX
Total Kewajiban dan Ekuitas		XXXXXX		XXXXXX

Catatan :
Dalam hal KJPP mempunyai cabang, maka Laporan Keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan KJPP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 2.08 : Laporan Laba Rugi Komparatif

KJPP

LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
Untuk Periode

	Tahun Sebelumnya		Tahun Berjalan	
Pendapatan Usaha				
Jasa Penilaian	XXXXX		XXXXX	
Jasa Non Penilaian	XXXXX		XXXXX	
..... dst				
Total Pendapatan Usaha		XXXXX		XXXXX
Biaya Usaha :				
Gaji dan Honor	XXXXX		XXXXX	
Transportasi dan Perjalanan Dinas	XXXXX		XXXXX	
Biaya usaha lainnya	XXXXX		XXXXX	
..... dst	XXXXX		XXXXX	
Total Biaya Usaha		XXXXX		XXXXX
Laba (Rugi) Bruto		XXXXX		XXXXX
Beban Administrasi dan Umum :				
Biaya Royalti	XXXXX		XXXXX	
Iuran	XXXXX		XXXXX	
..... dst	XXXXX		XXXXX	
Total Beban Adminisrasi dan Umum		XXXXX		XXXXX
Pendapatan dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain	XXXXX		XXXXX	
Beban Lain-lain	XXXXX		XXXXX	
..... dst	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Laba (Rugi) sebelum Pajak		XXXXX		XXXXX
Pajak Penghasilan		XXXXX		XXXXX
Laba (Rugi) Setelah Pajak		XXXXX		XXXXX



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Formulir 2.09 : Catatan Atas Laporan Keuangan

KJPP
Catatan atas Laporan Keuangan
Per Tanggal

- A. Umum
KJPP xxx didirikan berdasarkan dan seterusnya
- B. Kebijakan Akuntansi
Ikhtisar kebijakan akuntansi utama yang dianut oleh KJPP adalah sebagai berikut :
- a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Periode Akuntansi
 - c.
 - d.
- ... dan seterusnya

Penjelasan Catatan Laporan Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Jumlah tersebut merupakan saldo

2. Uang muka Pajak

Jumlah tersebut merupakan saldo

3. Asset Tetap

Jumlah tersebut merupakan saldo

... dan seterusnya

8. Pendapatan

Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan gabungan antara Kantor Pusat dan Cabang.

Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik diperoleh dari :

Jasa Penilaian sebesar

Jasa Non Penilaian sebesar

... dan seterusnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

9. Beban Operasi

Beban Operasi KJPP berasal dari gaji rekan Penilai Publik sebesar, gaji tenaga penilai sebesar, gaji tenaga ahli lainnya, gaji tenaga administrasi, gaji tenaga asing, dan biaya perjalanan dinas rekan sebesar serta biaya perjalanan dinas tenaga penilai sebesar dan seterusnya

10. Beban administrasi dan umum

Di dalam beban administrasi dan umum, termasuk biaya di dalamnya, biaya royalti atau pun fee sebagai konsekuensi dilakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik asing.
... dan seterusnya

15. Ekuitas

Setoran modal dari pemilik terdiri dari setoran rekan Penilai Publik sebesar, dan setoran rekan yang bukan penilai publik sebesar Dalam tahun berjalan, terjadi penarikan modal (prive) dari rekan penilai publik sebesar dan rekan yang bukan penilai publik sebesar.....
... dan seterusnya



Formulir 2.11 : Laporan Tenaga Asing pada KJPP
 yang bekerja sama dengan KJPPA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
LAPORAN TENAGA ASING PADA KJPP YANG BEKERJASAMA DENGAN KJPPA KJPP TAHUN TAKWIM	
I. Informasi Pemimpin/Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik	
1. Nama :	<input type="text"/>
2. Izin Penilai Publik :	Nomor : <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Tgl Bln Thn
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
3. Nama KJPP :	<input type="text"/>
4. Alamat KJPP :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Faksimile : <input type="text"/> - <input type="text"/>
5. Izin Usaha KJPP :	Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Tgl Bln Thn
6. Bentuk Usaha :	<input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Persekutuan
7. Jumlah Rekan :	<input type="text"/> Penilai Publik <input type="text"/> L <input type="checkbox"/> P
	<input type="text"/> Non Penilai Publik <input type="text"/> L <input type="checkbox"/> P
Informasi Tenaga Asing yang bekerja pada KJPP	
8. Nama :	<input type="text"/>
9. Izin Bekerja dari Instansi :	Nomor : <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Tgl Bln Thn
10. Kewarganegaraan :	<input type="text"/>
11. Keahlian :	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
12. Rencana Kerja :	<div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

13. Realisasi	:	<div style="border: 1px solid black; height: 70px;"></div>
14. Jangka Waktu Penugasan	:	
Pemimpin/Pemimpin Rekan		
(nama lengkap) NIPP		
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Formulir disediakan untuk informasi setiap Tenaga Kerja Asing- Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :<ul style="list-style-type: none">a. fotokopi kartu identitas masing-masing tenaga asingb. fotokopi izin kerja tenaga asing dari instansi yang berwenangc. fotokopi bukti tanda kelulusan pendidikan terakhir		



Formulir 3 : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan : Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP *).....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data yang kami sampaikan dan lampirkan pada formulir Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Program Kerjasama dengan KJPPA, dan Laporan Realisasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk tahun takwim adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan benar, ditandatangani pada tanggal tertera pada akhir keterangan ini dengan meterai cukup untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini diketahui tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

meterai

(.....)

NIPP

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN

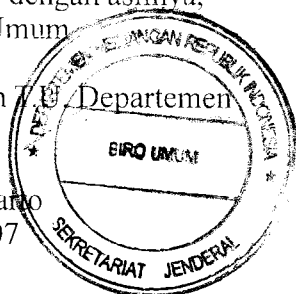
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian

Antonius Suharto
NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir 1 : Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP,
Perubahan Susunan Rekan KJPP, Perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan
atau Pemimpin Cabang KJPP dan Penutupan Kantor Perwakilan KJPP

.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP /
Perubahan Susunan Rekan KJPP / Perubahan
Pemimpin/Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KJPP
/ Penutupan Kantor Perwakilan KJPP *)

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan perubahan alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP / perubahan susunan Rekan KJPP / perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KJPP / penutupan Kantor Perwakilan KJPP. *)

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



Formulir 2 : Laporan Perubahan Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP /
 Perubahan Susunan Rekan KJPP / Perubahan Pemimpin/Pemimpin Rekan
 atau Pemimpin Cabang KJPP / Penutupan Kantor Perwakilan KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
LAPORAN PERUBAHAN *) :	
I. Alamat KJPP dan/atau Cabang KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
II. Susunan Rekan KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
III. Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
IV. Pemimpin Cabang KJPP;	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
V. Penutupan Kantor Perwakilan KJPP.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Informasi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
1. Nama :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2. Izin Usaha :	Nomor : KEP - <input style="width: 100%;" type="text"/>
	Tanggal : <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 40px;" type="text"/>
	Tgl Bln Thn
Perubahan Yang Terjadi*) :	
3. Perubahan Alamat KJPP / Cabang KJPP **)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Alamat (lama) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Kota	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Kode Pos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Telepon	<input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 80px;" type="text"/>
Faksimile	<input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 80px;" type="text"/>
Alamat (baru) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Kota	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Kode Pos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Telepon	<input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 80px;" type="text"/>
Faksimile	<input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 80px;" type="text"/>
**) dicoret yang tidak sesuai.	
4. Susunan Rekan KJPP	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Jumlah Sekutu KJPP (lama) :	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Penilai Publik
	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Non Penilai Publik
Jumlah Sekutu KJPP (baru) :	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Penilai Publik
	<input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Non Penilai Publik
Lampiran daftar rekan diisi dengan lengkap	
5. Pemimpin Rekan KJPP	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Nama Pemimpin Rekan (lama) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Izin Penilai Publik :	NIPP : <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 20px;" type="text"/> . <input style="width: 40px;" type="text"/>
Tanggal	<input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 20px;" type="text"/> - <input style="width: 40px;" type="text"/>
	Tgl Bln Thn
Nama Pemimpin Rekan (baru) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Izin Penilai Publik	:	NIPP	:	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Tanggal		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Tgl		Bln		Thn					
6. Pemimpin Cabang KJPP				<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak						
Nama Pemimpin Cabang (lama)	:	<input type="text"/>											
		<input type="text"/>											
Izin Penilai Publik	:	NIPP	:	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Tanggal		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Tgl		Bln		Thn					
Nama Pemimpin Cabang (baru)	:	<input type="text"/>											
		<input type="text"/>											
Izin Penilai Publik	:	NIPP	:	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Tanggal		<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Tgl		Bln		Thn					
		Pemimpin / Pemimpin Rekan											
		(nama lengkap)											
		NIPP.....											
*) pilih sesuai dengan perubahan yang terjadi.													
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :													
I. Perubahan Alamat :													
a. fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor;													
b. fotokopi surat keterangan domisili;													
c. denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;													
d. foto kantor tampak depan dan foto ruangan.													
II. Perubahan Susunan Rekan KJPP :													
a. fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris;													
b. fotokopi izin Penilai Publik;													
c. surat pengunduran diri dari KJPP untuk Penilai Publik yang mengundurkan diri.													
III. Perubahan Pemimpin Rekan KJPP :													
a. surat persetujuan dari seluruh rekan mengenai perubahan pemimpin rekan KJPP;													
b. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penilai Publik yang bersangkutan menjadi pemimpin KJPP;													
c. fotokopi bukti domisili pemimpin rekan KJPP.													
IV. Perubahan Pemimpin Cabang KJPP :													
a. surat persetujuan dari seluruh rekan KJPP mengenai penunjukan Penilai Publik yang bersangkutan menjadi pemimpin Cabang KJPP;													
b. fotokopi bukti domisili pemimpin Cabang KJPP.													
V. Penutupan Kantor Perwakilan KJPP :													
Surat Keputusan Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJPP tentang penutupan Kantor Perwakilan KJPP.													

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum
 Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
 NIP. 0600411107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Formulir 1 : Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama Dengan KJPPA
Bersama-sama dengan Nama KJPP

.....
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama
dengan KJPPA Bersama-sama dengan Nama KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda I Lantai 6
Jl. Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan laporan untuk mengakhiri kerjasama pencantuman nama dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) bersama-sama dengan nama KJPP.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Formulir 2 yang telah dilengkapi dan kelengkapan data pendukung lainnya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin / Pemimpin Rekan *),

(.....)
NIPP

*) coret yang tidak sesuai.



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Formulir 2 : Laporan Untuk Mengakhiri Kerjasama Pencantuman Nama dengan KJPPA
 Bersama-sama dengan Nama KJPP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI LAPORAN UNTUK MENGAKHIRI KERJASAMA PENCANTUMAN NAMA DENGAN KJPPA BERSAMA-SAMA DENGAN NAMA KJPP	
Pemimpin / Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)	
1. Nama	: <input type="text"/>
2. Alamat rumah	: <input type="text"/> <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
3. Izin Penilai Publik	: NIPP : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
Kantor Penilai Publik (KJPP)	
4. Nama KJPP	: <input type="text"/>
5. Alamat Kantor	: <input type="text"/> <input type="text"/>
	Kota : <input type="text"/>
	Kode Pos : <input type="text"/>
	Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Faksimile : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	Website : <input type="text"/>
6. Izin Usaha KJPP	: Nomor : KEP - <input type="text"/>
	Tanggal : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> Tgl Bln Thn
7. Bentuk Usaha	<input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Persekutuan
Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) Yang Dibatalkan	
8. Nama KJPPA	: <input type="text"/>
9. Alamat	: <input type="text"/> <input type="text"/>
	: Kota : <input type="text"/>
	: Negara : <input type="text"/>
	: Telepon : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	: Faksimile : <input type="text"/> - <input type="text"/>
	: Website : <input type="text"/>
	: Email : <input type="text"/>
Pihak Yang Melakukan Pembatalan Kerja Sama	
10. KJPP	: Nama : <input type="text"/>
	: Jabatan : <input type="text"/>
11. KJPPA	: Nama : <input type="text"/>
	: Jabatan : <input type="text"/>
12. Alasan Pembatalan	: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 125 /PMK.01/2008
TENTANG JASA PENILAI PUBLIK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- a. Fotokopi pembatalan perjanjian kerja sama dengan KJPPA;
- b. Dokumen yang membuktikan berakhirnya kerjasama dengan KJPPA.

Pemimpin / Pemimpin Rekan
KJPP

(nama lengkap)
NIPP

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU. Departemen

Antoni Susanto
NIP/060041187

